

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki fungsi dalam sumber dana bagi negara untuk membiayai belanja negara (*budgetair*), dapat menjadi alat untuk mengatur atau melaksanakan program-program pemerintah dibidang sosial dan ekonomi (*regulerend*).

Penagihan pajak terjadi apabila jatuh tempo dasar penagihan lebih dari satu bulan dari tanggal penerbitan. Apabila dalam 7 hari sesudah jatuh tempo ditentukan tetap tidak melakukan pelunasan utang pajak oleh penanggung pajak, akan diterbitkan Surat Teguran. Surat Teguran adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak dan merupakan bentuk awal dalam melakukan tindakan penagihan pajak untuk memperingatkan penanggung pajak agar dapat segera melunasi utang pajaknya. Surat Teguran merupakan bentuk penagihan yang sederhana juga membutuhkan sedikit waktu dan biaya. Menurut Erwis (2012), hal ini sejalan dengan prinsip keseimbangan dalam penagihan pajak yang mempertimbangkan biaya penagihan dengan jumlah penerimaan pajak yang didapat. penanggung pajak harus membayar utang pajaknya hingga 21 hari setelah diterimanya Surat Teguran. Apabila setelah jatuh tempo penanggung pajak belum

membayar utang pajaknya, maka pejabat pajak akan menerbitkan Surat Paksa. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan oleh juru sita, hal ini dapat berupa pencegahan penanggung pajak, penyitaan, penyanderaan, pelelangan barang sitaan, dan menjual barang yang telah disita yang kemudian hasil pelelangan dan/atau penjualan barang sitaan tersebut digunakan untuk melunasi utang pajak Penanggung pajak.

Tentunya dalam praktik lapangan, juru sita mengalami hambatan dan tantangan dalam proses penerbitan Surat Teguran. Sehubungan dengan itu, di KPP Pratama Kediri sendiri diketahui masih banyak Surat Teguran yang tidak sampai ke Penanggung pajak khususnya wajib pajak Orang Pribadi dikarenakan penulisan alamat yang tidak lengkap saat pendaftaran, seperti kurangnya nomor rumah, nomor RT, dan nomor RW.

Permasalahan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sudah dibahas di peneletian terdahulu. Setiap penelitian mereka memiliki hasil yang berbeda. Pada penelitian Kurniasari et al. (2017), mengevaluasi bahwa pemungutan pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa cukup efektif. Berbeda dengan penelitian Najoran et al. (2016), bahwa hasil dari penelitiannya menunjukkan penagihan pajak dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa tergolong tidak efektif. Hasil penelitian yang berbeda tingkat optimalisasinya ini terjadi dikarenakan perbedaan kendala dan hambatan di tempat Kantor Pelayanan Pajak berada saat proses penagihan pajaknya.

Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lagi di bidang yang sama dengan objek penelitian yang sama, yaitu Kantor Pelayanan

Pajak Pratama yang bertempat di Kediri. KPP Pratama Kediri adalah salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas dan bertanggung jawab atas administrasi perpajakan wajib pajak. Salah satu tugasnya adalah melakukan penagihan kepada wajib pajak di wilayah Kota Kediri. Penulis berharap dengan meninjau pengoptimalan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dapat memberikan kontribusi penagihan pajak di KPP Pratama Kediri.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dirangkum dari bagian latar belakang di atas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah tingkat optimalisasi penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kediri?
2. Apakah kendala yang ditemukan dalam penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa kepada wajib pajak di KPP Pratama Kediri?
3. Bagaimanakah cara mengatasi kendala penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Kediri?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi tingkat optimalisasi penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kediri.
2. Mengidentifikasi kendala yang ditemukan dalam penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa kepada wajib pajak di KPP Pratama Kediri.

3. Mengidentifikasi cara mengatasi kendala penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Kediri.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada penagihan pajak khususnya mengenai tingkat optimalisasi sistem perpajakan di KPP Pratama Kediri melalui penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa berdasarkan UU No. 19 tahun 2000 dan PMK 189/PMK.03/2020. Penulisan ini hanya menggunakan data tahun 2020 dan tahun 2021 dikarenakan pengosongan data pada tahun sebelumnya oleh KPP Pratama Kediri.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis mengharapkan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. dapat memberikan pengetahuan terutama di bidang perpajakan mengenai penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Kediri.
2. diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian untuk penelitian - penelitian selanjutnya.
3. bagi KPP Pratama Kediri, memberikan masukan agar lebih memperhatikan masyarakat untuk taat membayar pajak.
4. bagi wajib pajak, mendapat pengetahuan mengenai mekanisme penagihan pajak apabila terlambat melunasi utang pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas gambaran umum penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian terkait objek penelitian. Bab ini juga membahas tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan untuk mendukung penyelesaian Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang keterkaitan topik yang diangkat dengan penelitian terdahulu serta mengenai tinjauan teori, definisi, serta dasar hukum yang menjadi landasan pembahasan topik yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan pembahasan mengenai permasalahan dalam karya tulis ini. Dengan menggunakan data, informasi, dan fakta yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan, penulis membahas serta menganalisis data-data tersebut berdasarkan konsep, teori, prinsip dan peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menyampaikan simpulan hasil penelitian penulis dalam pembahasan yang telah disajikan dalam bab sebelumnya. Pada bab ini penulis juga memberikan saran yang ditujukan kepada pihak yang menjadi objek penelitian sebagai masukan yang membangun yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lainnya.